

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kepemimpinan

1. Konsep Pemimpin

Konsep “pemimpin” berasal dari kata asing “*leader*” dan “kepemimpinan” dari “*leadhershship*”. Pemimpin artinya adalah seseorang yang mempunyai kemampuan dalam penyelenggaraan suatu kegiatan organisasi agar kegiatan tersebut dapat terselenggara dengan efisien. Selanjutnya, agar terjadi ketertiban dalam kegiatan organisasi diperlukan pengaturan mengenai pembagian tugas, cara kerja dan hubungan antara pekerjaan yang satu dengan pekerjaan yang lain.

Pemimpin dapat diartikan predikat yang disandang seseorang sebagai pemimpin yang memiliki kewenangan, maka pemimpin tersebut wajib melaksanakan fungsinya. Berikut ini adalah pengertian menurut beberapa ahli:

- a. Menurut Kouzes (2004:17), mengatakan bahwa pemimpin adalah pionir sebagai orang yang bersedia melangkah ke dalam situasi yang tidak diketahui. Pemimpin yang mempunyai visi yang jelas dapat menjadi penuntun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin.
- b. Menurut Sudriamunawar (2006:1), mengatakan pemimpin adalah seseorang yang memiliki kecakapan tertentu yang dapat mempengaruhi

para pengikutnya untuk melakukan kerjasama kearahpencapaian tujuan yang telah di tenttukan sebelumnya.

- c. Menurut Matondang (2008:5), mengatakan bahwa pemimpin adalah seseorang yang mampu mempengaruhi orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang diinginkan.
- d. Menurut Bennis (1998:71), mengatakan bahwa pemimpin adalah orang yang paling berorientasi hasil di dunia, dan kepastian dengan hasil ini hanya positif kalau seseorang mengetahui apa yang diinginkannya.
- e. Menurut Kartono (2005:51), menyatakan pemimpind adalah seorang pribadi yang memiliki superioritas tertentu, sehingga dia memiliki kewibawaan dan kekuasaan untuk menggerakkan orang lain melakukan usaha bersama guna mencapai sasaran tertentu.
- f. Menurut Rivai (2004:65), menyatakan pemimpin adalah anggota dari suatu kumpulan yang diberi kedudukan tertentu dan diharapkan dapat bertindak sesuai kedudukannya. Jadi pemimpin adalah juga seseorang dalam suatu perkumpulan yang diharapkan dapat menggunakan pengaruhnya untuk mewujudkan dan mencapai tujuan kelompok.
- g. Menurut Sudriamunawar (2006:1), pemimpin adalah seseorang yang memiliki kecakapan tertentu yang dapat mempengaruhi para pengikutnya untuk melakukan kerja sama kea rah pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
- h. Raven dalam Wirjana (2006:4), mengatakan bahwa pemimpin adalah “seseorang menduduki suatu posisi di kelompok, mempengaruhi orang-

orang dalam mengkoordinasi serta mengarahkan kelompok untuk mempertahankan diri serta mencapai tujuannya”.

- i. Menurut Nawawi (2004:9), mengatakan bahwa pemimpin adalah orang yang memimpin.
- j. Sedangkan pengertian pemimpin yang paling baru sebagai *post modern* dari menurut Lantu dalam bukunya (2007:29), menyatakan bahwa pemimpin adalah pelayan. Definisi yang terakhir sangat menarik karena yang terjadi selama ini adalah pemimpin yang dilayani, bukan melayani. Intinya pemimpin adalah orang yang mempunyai pengikut atau pendukung karena kapasitasnya.

Dari berbagai pengertian menurut beberapa ahli diatas, maka penulis menyimpulkan pengertian mengenai pemimpin adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk mengatur, mendorong, mengkoordinasi dan mempengaruhi orang lain dalam rangka melakukan kerjasama kearah pencapaian tujuan bersama yang telah ditentukan.

2. Konsep Kepemimpinan

Konsep kepemimpinan telah dikemukakan oleh berbagai literature kepemimpinan, disini penulis akan membahas konsep kepemimpinan pendapat dari berbagai ahli, salah satu konsep kepemimpinan menurut Stoner (1996:161), mengatakan kepemimpinan adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dari anggota kelompok. Menurut Cleary (2002:5), berpendapat lain tentang kepemimpinan

adalah sebuah persoalan kecerdasan, kelayakan untuk dipercaya, kelembutan, keberanian dan ketegasan. Menurut pendapat Kartono (2005:153), menyatakan kepemimpinan adalah “kemampuan” untuk memberikan pengaruh yang konstruktif kepada orang lain untuk melakukan suatu usaha kooperatif mencapai tujuan yang sudah direncanakan.

Kemudian menurut Stogdill (1974:259), mencoba mempetakan definisi kepemimpinan. Sebagai berikut: (1) Kepemimpinan sebagai proses kelompok, (2) Kepemimpinan sebagai kepribadian yang berakibat, (3) Kepemimpinan sebagai seni menciptakan kesepakatan, (4) Kepemimpinan sebagai kemampuan mempengaruhi, (5) Kepemimpinan sebagai tindakan perilaku, (6) Kepemimpinan sebagai bentuk bujukan, (7) Kepemimpinan sebagai suatu hubungan kekuasaan, (8) Kepemimpinan sebagai sarana pencapaian tujuan, (9) Kepemimpinan sebagai hasil interaksi, (10) Kepemimpinan sebagai pemisahan peranan, dan (11) Kepemimpinan sebagai awal struktur.

Dari berbagai definisi diatas, maka dapat kita simpulkan dijadikan untuk menambah definisi kepemimpinan adalah (*cara atau teknik=gaya*). Dari definisi kepemimpinan tersebut diatas mencerminkan bahwa kepemimpinan menyangkut sebuah proses pengaruh sosial yang dalam hal ini pengaruh yang disengaja dijalankan oleh seseorang terhadap orang lain untuk menstruktur aktivitas-aktivitas serta hubungan-hubungan di dalam sebuah kelompok atau birokrasi.

Pada dasarnya model kepemimpinan atau banyak berpengaruh terhadap keberhasilan seorang pemimpin dalam mempengaruhi perilaku pengikut-pengikutnya. Model kepemimpinan merupakan cara atau norma perilaku yang digunakan oleh seseorang, dan pada seseorang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang diamati.

Secara umum model kepemimpinan hanya dikenal dalam dua model, yaitu model otoriter dan demokrasi. Model kepemimpinan otoriter biasanya dipandang sebagai model yang didasarkan atas kekuatan posisi dan pengguna otoritas dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai pemimpin, biasanya bersifat memaksakan dan menekan. Sedangkan model kepemimpinan demokratis dikaitkan dengan kekuatan personal dan keikutsertaan para pengikut dalam proses pemecahan masalah dan pengambilan keputusan.

3. Definisi Militer

Pengertian Militer Secara harfiah militer berasal dari kata Yunani, dalam bahasa Yunani adalah orang yang bersenjata siap untuk bertempur, orang-orang ini terlatih dari tantangan untuk menghadapi musuh, sedangkan ciri-ciri militer sendiri mempunyai organisasi teratur, pakaiannya seragam, disiplinnya tinggi, mentaati hukum yang berlaku dalam peperangan. Apabila ciri-ciri ini tidak dimiliki atau dipenuhi, maka itu bukan militer, melainkan itu suatu gerombolan bersenjata (Faisal Salam, 2006 ; 13). Militer menurut Amiroeddin Syarif (1996 :1) adalah orang yang dididik, dilatih dan dipersiapkan untuk bertempur. Karena itu bagi mereka diadakan norma-norma atau kaidah-kaidah

yang khusus, mereka harus tunduk tanpa reserve pada tata kelakuan yang ditentukan dengan pasti dan pelaksanaannya diawasi dengan ketat.

Maka dapat penulis simpulkan bahawasannya Militer dapat diartikan sebagai kelompok yang memegang senjata dan merupakan organisasi kekerasan fisik yang sah untuk mengamankan negara dari ancaman luar negeri maupun dalam negeri. Dalam hal ini, militer berfungsi sebagai alat negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Militer juga dapat didefinisikan sebagai sebuah organisasi yang diberi wewenang oleh Negara untuk menggunakan kekuatan termasuk menggunakan senjata, dalam mempertahankan bangsanya ataupun untuk menyerang Negara lain.

4. Indikator-Indikator Kepemimpinan

Menurut Davis yang dikutip oleh Reksohadiprojo dan Handoko (2003: 290-

291), ada 10 ciri utama yang mempunyai pengaruh terhadap kesuksesan kepemimpinan dalam pemerintahan antara lain sebagai berikut :

1. Kecerdasan (*Intelligence*)

Penelitian-penelitian pada umumnya menunjukkan bahwa seorang pemimpin yang mempunyai tingkat kecerdasan yang lebih tinggi daripada pengikutnya, tetapi tidak sangat bebrbeda.

2. Kedewasaan, Sosial dan Hubungan Sosial yang luas (*Social maturity and Breadht*)

Pemimpin cenderung mempunyai emosi yang stabil dan dewasa atau matang, serta mempunyai kegiatan dan perhatian yang luas.

3. Motivasi diri dan dorongan berprestasi

Pemimpin secara relatif mempunyai motivasi dan dorongan berprestasi yang tinggi, mereka bekerja keras lebih untuk nilai intrinsik.

4. Sikap-sikap hubungan manusiawi

Seorang pemimpin yang sukses akan mengakui harga diri dan martabat pengikut-pengikutnya, mempunyai perhatian yang tinggi dan berorientasi pada bawahannya.

5. Memiliki Pengaruh Yang Kuat

Seorang pemimpin harus memiliki pengaruh yang kuat untuk menggerakkan orang lain atau bawahan agar berusaha mencapai tujuan kelompok secara sukarela.

6. Memiliki Pola Hubungan Yang Baik

Seorang pemimpin sukses mampu menciptakan pola hubungan agar individu, dengan menggunakan wewenang dan pengaruhnya terhadap sekelompok orang agar bekerja sama dalam mencapai tujuan yang dikehendaki bersama.

7. Memiliki Sifat-Sifat Tertentu

Seorang Pemimpin sukses memiliki sifat-sifat khusus seperti kepribadian baik, kemampuan tinggi dan kemampuan tinggi dan kemauan keras, sehingga mampu menggerakkan bawahannya.

8. Memiliki Kedudukan atau Jabatan

Seorang pemimpin selalu memiliki kedudukan atau jabatan dalam organisasi, baik di pemerintahan maupun di masyarakat karena kepemimpinan merupakan serangkaian kegiatan pemimpin yang tidak dapat dipisahkan dari kedudukan jabatan dan gaya atau perilaku pemimpin itu sendiri.

9. Mampu Berinteraksi

Seorang pemimpin yang baik akan selalu berinteraksi secara baik dengan sesama pemimpin, bawahan dan masyarakat yang dipimpinnya, dalam situasi dan kondisi apa pun, buruk maupun menyenangkan.

10. Mampu Memberdayakan

Seorang pemimpin yang sukses biasanya mampu memberdayakan bawahan dan masyarakat yang dipimpinnya.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa seorang pemimpin harus mempunyai tingkat kecerdasan yang lebih tinggi daripada bawahannya dan mempunyai motivasi dan dorongan berprestasi yang tinggi pula

5. Fungsi Kepemimpinan

Fungsi artinya jabatan (pekerjaan) yang dilakukan atau kegunaan sesuatu hal atau kerja suatu bagian tubuh. Sedangkan fungsi kepemimpinan berhubungan langsung dengan situasi dalam kehidupan kelompok/organisasi masing - masing, yang mengisyaratkan bahwa setiap pemimpin berada di dalam dan di luar situasi itu. Fungsi kepemimpinan memiliki dua dimensi yaitu:

- a. Dimensi yang berkenaan dengan tingkat kemampuan mengarahkan (*direction*) dalam tindakan atau aktivitas pemimpin.
- b. Dimensi yang berkenaan dengan tingkat dukungan (*support*) atau keterlibatan orang-orang yang dipimpin dalam melaksanakan tugas – tugas pokok kelompok/organisasi.

Secara operasional dapat dibedakan menjadi lima fungsi pokok kepemimpinan, yaitu:

- a. Fungsi Instruksi/Perintah

Yaitu fungsi kepemimpinan yang bersifat satu arah kepada yang dipimpinnya. Pemimpin sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bilamana, dan dimana perintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif. Hal ini sejalan dengan pengertian kepemimpinan yaitu kemampuan menggerakkan orang lain agar melaksanakan perintah atau keputusan yang telah ditetapkan.

- b. Fungsi Konsultatif

Fungsi ini bersifat dua arah. Pada tahap pertama dalam usaha menetapkan keputusan, pemimpin kerap kali memerlukan bahan pertimbangan, yang mengharuskannya berkonsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya yang dinilai mempunyai berbagai bahan informasi yang diperlukan dalam menetapkan keputusan.

- c. Fungsi Partisipatif

Yaitu dalam fungsi ini pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakan keputusan. Partisipasi tidak berarti bebas berbuat semaunya, berupa dalam bentuk kejasama tetapi dilakukan secara terkendali dan terarah tidak mencampuri atau mengambil tugas pokok.

d. Fungsi Delegasi

Fungsi ini pemimpin memberikan pelimpahan wewenang dengan membuat /menetapkan keputusan, baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan dari pimpinan. Fungsi ini dasarnya meletakkan suatu rasa kepercayaan kepada seseorang. Orang-orang penerima delegasi itu harus diyakini merupakan pembantu pemimpin yang memiliki kesamaan prinsip, persepsi, dan aspirasi.

6. Tipe Kepemimpinan

Menurut Veithzal (2009:42) ada tiga tipe yaitu:

a. Tipe Kepemimpinan Otoriter

Pemimpin bertindak sebagai penguasa tunggal, kedudukan dan tugas anak buah semata-mata hanya sebagai pelaksana keputusan, perintah dan bahkan kehendak pemimpin. Kepemimpinan Otoriter organisasinya tidak dinyatakan milik bersama untuk tujuan bersama. Bawahan sebagai manusia hanya dijadikan alat untuk mencapai tujuan pemimpin. Oleh karena itu, sering terjadi perlakuan yang tidak manusiawi terhadap para anggota organisasi atau bawahan. Anggota organisasi atau bawahan disebutnya buruh atau karyawan

yang berada dilingkungannya karena di upah sebagai pembayar pelaksana pekerjaan yang harus dilaksanakan secara patuh tanpa membantah. Biasanya tipe ini bersifat menekan atau memaksa.

b. Tipe Kepemimpinan Kendali Bebas

Pemimpin berkedudukan sebagai symbol. Kepemimpinan dijalankan dengan memberikan kebebasan penuh pada orang yang dipimpin dalam mengambil keputusan dan melakukan kegiatan menurut kehendak dan kepentingan masing-masing, baik secara perorangan maupun kelompok.

c. Tipe Kepemimpinan Demokratis

Pemimpin menempatkan manusia sebagai factor utama dan terpenting dalam setiap kelompok atau organisasi. Pemimpin memandang dan menempatkan orang yang dipimpinnya sebagai subjek yang memiliki kepribadian dengan berbagai aspeknya, seperti dirinya juga.

Kemudian menurut Kartono (2009:80-87) membagi tipe kepemimpinan sebagai berikut:

a. Tipe Karismatis

Tipe pemimpin karismatis memiliki kekuatan energy, daya Tarik dan berwibawa yang luar biasa untuk mempengaruhi orang lain, sehingga ia mempunyai pengikut yang sangat besar jumlahnya.

b. Tipe Militeristis

Tipe ini sifatnya seperti kemiliter-militeran. Hanya gaya luaran saja yang mencontoh gaya militer. Tetapi jika dilihat lebih seksama, ini mirip sekali dengan type kepemimpinan otoriter.

c. Tipe Otokratis

Tipe kepemimpinan otokratis ini mendasar diri pada kekuasaan dan paksaan yang mutlak harus dipatuhi. Pemimpinnya selalu mau berperan sebagai pemain tunggal pada *a one-man show*. Dia berambisi sekali untuk merajai situasi.

d. Tipe Laisser Faire

Pada kepemimpinan *laissez faire* sang pemimpin praktis tidak memimpin dia membiarkan kelompoknya dan setiap orang berbuat semau sendiri. Pemimpin tidak berpartisipasi sedikitpun dalam kegiatan kelompoknya. Semua pekerjaan dan tanggung jawabpun harus dilakukan oleh bawahan sendiri. Dan merupakan pemimpin symbol, dan biasanya tidak memiliki keterampilan teknis.

e. Tipe Populistic

Worsley dalam bukunya *the third world* dalam Kartono (1982:85) mendefinisikan kepemimpinan populistis sebagai kepemimpinan yang dapat membangunkan solidaritas rakyat. Kepemimpinan populistis ini berpegang teguh pada nilai-nilai masyarakat yang tradisional.

f. Tipe administratif

Kepemimpinan ini ialah kepemimpinan yang mampu menyelenggarakan tugas-tugas administrasi secara efektif.

g. Tipe Demokratis

Kepemimpinan demokratis berorientasi pada manusia, dan memberikan bimbingan yang efisien kepada para pengikutnya. Kepemimpinan demokratis menghargai potensi setiap individu mau mendengarkan nasihat dan sugesti bawahan. Juga bersedia mengakui keahlian spesialis dengan bidangnya masing-masing mampu memanfaatkan kapasitas setiap anggota seefektif mungkin pada saat-saat dan kondisi yang tepat.

Menurut Siagian (1997:43-47) berpendapat bahwa model kepemimpinan terbagi dalam 5 macam, yaitu:

a. Model Kepemimpinan Otoriter

- 1). Menganggap organisasi sebagai milik pribadi.
- 2). Mengidentikan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi
- 3). Menganggap sebagai alat semata-mata.
- 4). Tidak mau menerima kritik, saran dan pendapat.
- 5). Terlalu tergantung kepada kekuasaan formalnya.
- 6). Dalam tindakan penggerakannya sering mempergunakan pendekatan yang mengandung unsur paksaan dan bersifat menghukum.

b. Model Kepemimpinan Militeristik

Perlu diperhatikan terlebih dahulu bahwa yang dimaksud dari seorang pemimpin tipe militerisme berbeda dengan seorang pemimpin organisasi militer. Dan pemimpin tipe militeristik berbeda dengan seorang pemimpin modern. Seorang pemimpin yang bertipe militeristik ialah seorang pemimpin yang memiliki sifat-sifat sebagai berikut ini:

- 1) Dalam menggerakkan bawahan system “perintah” yang lebih sering dipergunakan.
- 2) Dalam menggerakkan bawahan senang bergantung kepada pangkat dan jabatannya.
- 3) Menuntut disiplin yang tinggi dan kaku dari bawahannya, dan menggemari upacara-upacara untuk berbagai keadaan.

C. Model Kepemimpinan Paternalistik

Seorang pemimpin yang tergolong sebagai pemimpin yang paternalistik ialah seorang yang memiliki ciri sebagai berikut:

- 1) Jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil keputusan
- 2) Jarang memberikan kesempatan pada bawahannya untuk mengambil inisiatif, dan jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan daya kreasi dan fantasinya, serta sering bersikap maha tahu.

D. Model Kepemimpinan Karismatik

Model kepemimpinan tipe ini bersandar pada karakteristik kualitas kepribadian yang istimewa sehingga mampu menciptakan kepengikutan pada pemimpin sebagai panutan, yang memiliki daya Tarik yang sangat memukai, dengan memperoleh engikut yang banyak (sangat besar) jumlahnya. Kepemimpinan karismatik dapat diartikan sebagai kepemimpinan yang memiliki kekuasaan yang kuat dan tetap serta dipercayai oleh pengikut-pengikutnya. Sejalan dengan pengertian itu dikatakan oleh Fred Luthans (1995:335) bahwa *charismatic leadership is throw back to the old conception of leader as being those who by the force of their personal abilities are capable of having profound and extraordinary effects on followers.*

Berdasarkan uraian diatas kepemimpinan karismatik dapat diartikan sebagai kemampuan mempengaruhi orang lain dengan mendayagunakan keistimewaan atau kelebihan dalam sifat atau aspek kepribadian pemimpin, sehingga menimbulkan rasa hormat, rasa segan dan kepatuhan yang tinggi pada para mpengikutnya.

Berikut menurut Yulk (1989:205) menyatakan indikator kepemimpinan karismatik sebagai berikut:

- 1) Pengikutnya meyakini kebenarannya dalam acara memimpin.
- 2) Pengikutnya menerima gaya kepemimpinannya tanpa bertanya.
- 3) Pengikutnya memiliki kasih sayang kepada pemimpinnya.
- 4) Kesadaran untuk mematuhi perintah pimpinannya.

- 5) Dalam mewujudkan misi organisasi melibatkan pengikutnya secara emosional.
- 6) Mempertinggi pencapaian kinerja (performance) pengikutnya.
- 7) Dipercayai oleh pengikutnya bahwa dengan kepemimpinannya akan mampu mewujudkan misi organisasinya.

Sehubungan dengan indikator-indikator diatas, berarti kepemimpinan karismatik memiliki kebutuhan akan kekuasaan (*strong need of power*), memiliki kepercayaan diri yang tinggi (*high self confidence*) dan pendirian (prinsip) yang kuat pula dalam mewujudkan kepercayaan dan identitasnya (*strong conviction in their own belief and ideals*)

E. Model Kepemimpinan Demokratis

Pengetahuan tentang kepemimpinan telah membuktikan bahwa tipe pemimpin yang demokratislah yang paling tepat untuk organisasi modern. Hal ini terjadi tipe kepemimpinan ini memiliki karakteristik sebagai berikut

- 1). Senang menerima saran, pendapat, dan bahkan kritikan dari bawahannya.
- 2). Ikhlas memberikan kebebasan yang seluas – luasnya kepada bawahannya untuk berbuat kesalahan yang kemudian diperbaiki agar bawahan itu tidak lagi berbuat kesalahan yang sama, tetapi lebih berani untuk berbuat kesalahan yang lain.

3). Selalu lebih berusaha untuk menjadikan bawahannya lebih sukses dari padanya. Dan berusaha mengembangkan kapasitas diri pribadinya sebagai pemimpin.

Secara implisit tergambar bahwa untuk menjadi pemimpin tipe demokratis bukanlah yang mudah. Namun, karena pemimpin yang demikian adalah yang paling ideal, alangkah baiknya jika semua pemimpin berusaha menjadi seorang pemimpin yang demokratis.

Selain itu menurut Max Webber tipe kepemimpinan terbagi menjadi tiga bagian, ialah:

1. Karismatik

Istilah ini dipergunakan mula-mula oleh Max Webber. Pemimpin disini diangkat berdasarkan atas suatu kepercayaan bahwa pemimpin itu dapat memberikan berkah karena “tuah/mantra”nya, keselamatan untuk melindungi rakyat, karena dianggap memiliki ilmu gaib. Kepemimpinan semacam ini tidak hanya terdapat dalam masyarakat yang primitive, tetapi justru pada masyarakat modern pun masih terdapat kepercayaan akan adanya pemimpin-pemimpin yang dianggap mempunyai “karisma” itu. Sukses dan prestasi yang dicapai oleh seorang pemimpin menimbulkan rasa kagum dan terpesona, sehingga timbul pikiran-pikiran yang mengatakan bahwa mustahil bila pemimpin itu tidak memiliki “ilmu gaib”.

2. Tradisional

Pemimpin semacam ini adalah pemimpin yang dipilih atas dasar kebiasaan turun temurun/tradisi. Misalnya pada jaman feodal, monarki: raja, bupati bahkan lurah didesa pun orang cenderung memilih turunan atau sanak family dari pejabat lama. Sistem ini tidak memperhitungkan kecakapan calon pemimpin, yang terpenting adalah melestarikan tradisi, dan pada umumnya rakyat begitu yakinnya akan kebaikan tradisi yang dianut. Melanggar tradisi berarti melanggar adat, sehingga jarang sekali rakyat biasa berani melanggar kebiasaan itu.

3. Rasional Legal

Tipe pemimpin seperti ini dipilih berdasarkan dua prinsip, yaitu rasional dan legal. Rasional bilang pengangkatan itu didasarkan atas landasan kecakapan, pengalaman, atau pendidikan dari yang bersangkutan dan legal, karena juga berlandaskan hukum atau peraturan yang berlaku.

Dengan demikian dapat terjadi, seorang yang diangkat jadi pemimpin karena ditunjuk atau ditetapkan dari atas, dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tadi yaitu, kecakapan, pengalaman, pendidikan, jasa-jasa, pertimbangan politis dan sebagainya.

Tiga tipe jenis-jenis pemimpin tersebut tentu saja masing-masing mempunyai segi negatif dan positifnya, yang jelas ialah bahwa suatu "cara" tidak selalu menentukan "isi". Sebab yang dianggap terpenting dari segi ini ialah bagaimana "kualitas" orang (person) yang terpilih menjadi pemimpin dan pimpinan itu.

Selain teori Max Webber, penulis memakai teori pendukung menurut Koentjaraningrat. Beliau mendefinisika kepemimpinan dan kekuasaan sebagai berikut:

Dalam memahami pemikiran Koentjaraningrat tentang kekuasaan dan kepemimpinan dalam berbagai pandangan elit. Secara umum fokus kajiannya hanya akan membahas bagaimana elit politik, baik tradisional (kuno) maupun elit modern (masa kini) dalam melihat kekuasaan dan kepemimpinan dalam sebuah negara, baik negara kecil maupun negara besar (modern) sebagai sebuah arena yang layak untuk diperebutkan oleh setiap individu dalam sebuah negara.

Untuk menjadi seorang tokoh yang dapat ditunjuk sebagai seorang pemimpin pada saat ada pekerjaan atau aktivitas bersama dalam masyarakat yang kecil ini, hanya dibutuhkan kemampuan atau ketrampilan untuk menyelesaikan pekerjaan atau aktivitas itu. Ini artinya dalam menyelesaikan masalah-masalah atau mengerjakan aktivitas tertentu lainnya, dapat muncul tokoh yang berbeda untuk menjadi pemimpin dalam mengerjakan aktivitas tersebut. Dan ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat yang masih relatif kecil dapat memunculkan tokoh-tokoh yang berbeda-beda dalam pekerjaan yang berbeda-beda pula. Hal ini tidak terlepas karena tidak adanya pemimpin formal yang berkuasa dalam seluruh lini kehidupan.

Oleh karena itu, Koentjaraningrat menyatakan bahwa dalam masyarakat yang kesatuan-kesatuan sosialnya sudah lebih besar dan

kompleks, maka mereka pun juga membutuhkan adanya seorang pemimpin formal yang tidak hanya ada atau muncul pada saat-saat tertentu saja ketika ada sebuah aktivitas bersama, tetapi mereka membutuhkan seorang pemimpin yang hadir dan dapat memberikan arahan dan pengaturan dalam seluruh lini kehidupan. Dan ini biasanya menurut Koentjaraningrat terjadi pada komunitas-komunitas yang hidup di daerah pegunungan di Irian Jaya, Papua Nugini dan Malanesia pada umumnya. Kesatuan-kesatuan yang sudah relatif besar ini dalam pandangan Koentjaraningrat disebut sebagai “masyarakat sedang”. Ini menunjukkan bahwa dalam “masyarakat sedang” diperlukan satu bentuk kepemimpinan yang mantap dan tetap, dan untuk memantapkan kepemimpinan itu diperlukan kekuasaan di samping kewibawaan.

Namun demikian, Koentjaraningrat mengemukakan bahwa dalam “masyarakat sedang” ini untuk menjadi pemimpin dan mempertahankan kekuasaannya tidak hanya diperlukan kewibawaan dan kepandaian atau ketrampilan dalam bidang tertentu saja sebagaimana dalam masyarakat komunitas sosialnya yang masih kecil, akan tetapi kekuasaan bagi mereka harus dipertahankan melalui berbagai kemampuan dan sifat yang di miliki.

Koentjaraningrat melihat bahwa sistem kekuasaan dalam negara kuno (tradisional) yang ada di dunia baik di Indonesia, Polonesia, Afrika, dan di Asia lainnya memiliki kesamaan konseptual dalam melihat kekuasaan dan kepemimpinan. Dalam negara kuno, di mana kesatuan-

kesatuan sosial berupa negara, dengan penduduk yang tidak lagi hanya terdiri dari beberapa ratus orang sebagaimana dalam “masyarakat sedang” melainkan beribu-ribu bahkan berpuluh ribu orang, dan dapat memberikan suatu rasa identitas kepada mereka. Dalam negara kuno yang seperti ini wewenang seorang pemimpin tidak lagi hanya dibutuhkan kewibawaan (*legitimacy*) saja, yang bersumber pada keahliannya, keterampilannya, dan kepandaiannya dalam lapangan-lapangan tertentu. Akan tetapi, kebanyakan elit penguasa negara kuno untuk mempertahankan dan menjaga loyalitas rakyatnya, menjadi sangat penting untuk menggunakan konsep-konsep religi dan cara-cara keagamaan untuk memaksakan keseragaman orientasi pada masyarakat yang ada dalam negara tersebut, yang awalnya memiliki aneka warna kebutuhan, kehendak dan keyakinan.

Dengan mengutip Marx Weber, Koentjaraningrat menyebut sifat-sifat keramat yang dimiliki oleh elit penguasa dalam negara kuno tersebut dengan “karisma”, suatu komponen yang sangat penting dalam kekuasaan tradisional. Dan dalam negara-negara modern pun, karisma ini juga masih sering dianggap penting bagi seorang pemimpin.

Untuk Indonesia dan mungkin bagi seluruh elit yang ingin menjadi dan mempertahankan kekuasaannya, Koentjaraningrat mengatakan bahwa meskipun kekuasaan pemimpin tradisional memiliki karisma sebagai komponen yang penting, sehingga menjadi unsur pokok yang menjaga kontinuitas kepemimpinannya, akan tetapi seorang pemimpin tidak

dapat mengabaikan komponen lain yakni apa yang disebut sebagai kekuasaan dalam arti khusus, yaitu: kemampuan untuk mengerahkan kekuatan fisik, dan untuk mengorganisir orang banyak untuk mengadakan sanksi. Selain itu seorang pemimpin haruslah memiliki sifat yang adil, baik hati dan bijaksana.

Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa komponen penting dalam kekuasaan yang harus diperhatikan oleh seorang elit politik yang ingin menjadi seorang pemimpin.

1. Adalah Kewibawaan, yang melingkupi popularitas, memiliki kapasitas rasional untuk memecahkan masalah sosial ekonomi politik, kecendekiawanan atau intelektual, dan memiliki sifat-sifat yang sesuai dengan cita-cita dan keyakinan dari sebagian besar warga masyarakat.
2. Adalah Wewenang, dimana seorang pemimpin memiliki legitimasi melalui prosedur-prosedur adat atau hukum yang berlaku dalam masyarakat dan negara.
3. Adalah memiliki kepemimpinan dan ciri-ciri rohaniah yang disegani, dan yang terakhir adalah kekuasaan dalam arti khusus, dimana seorang pemimpin mampu mengerahkan kekuatan fisik dan mengorganisasi orang banyak atas dasar sanksi.

A. Pengertian Pemerintahan Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, desa dapat disebut dengan istilah atau nama yang lain. Dalam penelitian ini desa, selanjutnya ditulis dengan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dibentuk dalam system Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa melalui pemerintahan desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah tertentu.

Pemerintahan desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintahan desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.⁷ Lebih lanjut Pemerintahan Desa berdasarkan PP No. 47 Tahun 2015 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia,

Pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik public maupun perdata, memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Kepala desa dengan persetujuan BPD mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan. Desa memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan desa, bantuan pemerintah dan pemerintah daerah, pendapat lain-lain yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa.

Penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa.

Kepala Desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggung jawabannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat. Kepada Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggung jawabannya dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggung jawabannya namun tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui badan Permusyawaratan

Desa untuk menanyakan dan atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang berhubungan dengan pertanggung jawaban tersebut. Desa tidak lagi merupakan level administrasi, tidak lagi menjadi bawahan daerah tetapi menjadi *independent community*, sehingga seatiap warga desa dan masyarakat desanya berhak berbicara atas kepentingannya sendiri dan bukan dari atas ke bawahan. Seperti selama ini terjadi.

Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penanggungjawab utama bidang pembangunan dapat dibantu lembaga kemasyarakatan yang ada di desa. Sedangkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sekretaris desa, kepala seksi, dan kepala dusun berada di bawah serta tanggung jawab kepada Kepala Desa.

7. Kepala Desa

Kepala Desa menurut Talizidhuhu Ndraha merupakan pemimpin di desa, semua urusan tentang kemakmuran, kesejahteraan masyarakat pembangunan dan lain-lain merupakan kewajiban dari kepala desa sebagai pemimpin formal yang ditunjuk oleh pemerintah. Adapun Pengertian kepala Desa Menurut Tahmit Kepala Desa adalah pemimpin dari desa di Indonesia, Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa, masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Kepala Desa tidak bertanggung jawab kepada Camat, namun hanya dikoordinasikan saja oleh Camat.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud Kepala Desa adalah seseorang yang bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggung jawabannya disampaikan kepada bupati atau walikota melalui Camat. Kepada Badan Pemusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya dan kepada rakyat memberikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya. Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa memiliki wewenang dan kewajiban. Wewenang Kepala Desa adalah:

Kewenangan dan/atau Fungsi Pemerintah Desa. Kewenangan dan/atau Fungsi Kepala Desa Dalam melaksanakan tugas kepala desa pada Pasal 26 ayat (2), Kepala Desa berwenang:

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.
3. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
4. Menetapkan Peraturan Desa.
5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

6. Membina kehidupan masyarakat Desa.
7. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa.
8. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
9. Mengembangkan sumber pendapatan Desa.
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
13. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif.
14. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Kepala Desa adalah:

- 1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

- 4) Melaksanakan kehidupan demokrasi.
- 5) Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
- 6) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintahan Desa.
- 7) Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.
- 8) Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.
- 9) Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa.
- 10) Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa.
- 11) Mendamaikan perselisihan masyarakat desa.
- 12) Mengembangkan pendapatan masyarakat desa.
- 13) Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai social budaya dan adat istiadat.
- 14) Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan desa.
- 15) Mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

B. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Perbedaan
1.	M. Rendi Renaldi	Pengaruh Model Kepemimpinan Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam	Meneliti lebih fokus terhadap partisipasi masyarakat dalam menjalankan roda

		Pembangunan Desa	pemerintahan.
2.	David. M	Pengaruh Model Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Efektivitas Pelayanan Aparat Terhadap Masyarakat.	Mencoba membahas mengenai perilaku aparat pemerintahan desa dalam pelayanan publik, meninjau efektivitas pelayanan yang dilakukan aparat pemerintah kelurahan yang ada di desa sobo kecamatan geyer kabupaten grobogan dari segi pelayanan pegawai dalam melayani masyarakat.

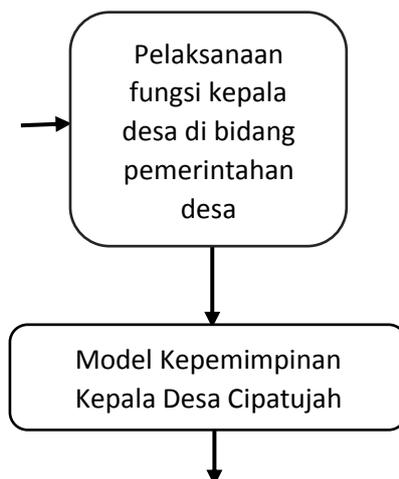
Kepemimpinan	Eriyan Galih Pratama	Model Kepemimpinan Politik Militer Terhadap Pemerintahan Lokal.	Membahas tentang tipe atau model kepemimpinan yang digunakan maupun yang diterapkan oleh kepala desa cipatujah.
--------------	-------------------------	--	---

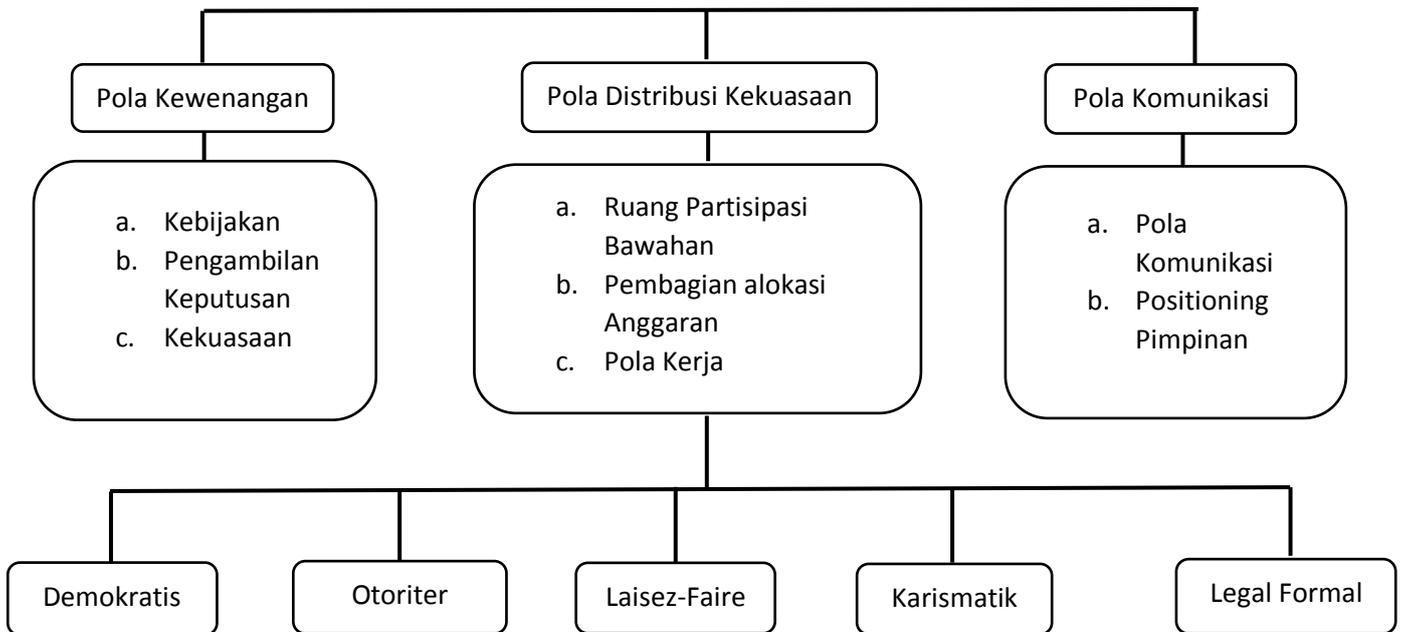
Tabel 2.1

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir penelitian mengenai Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Cipatujah Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya dalam melaksanakan Pemerintahan Desa sebagai berikut:

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran





Dari gambaran umum diatas dijelaskan bahwa kerangka pemikiran penelitian ini berangkat dari sebuah model kepemimpinan yang diterapkan oleh seorang purnawirawan militer berlokasi di desa cipatujah kecamatan cipatujah kabupaten tasikmalaya. Mengenai tentang pemimpin, setiap pemimpin memiliki ciri ataupun model yang berbeda dalam mempengaruhi setiap individu maupun kelompok.

Maju mundurnya suatu daerah tidak bisa terlepas dari seorang pemimpin dalam menjalankan tugas kepemimpinannya. Seorang pemimpin memiliki

perbedaan sebuah karakter dalam kepribadiannya. Kepribadian merupakan karakteristik seseorang yang menjadi prinsip dalam memimpin. Karakteristik tersebut bisa menjadi ciri khas suatu model ataupun model yang di terapkan oleh seseorang untuk menjalankan kekuasaan maupun menjalankan roda pemerintahan.

Pola pembuatan kebijakan, pengambilang keputusan, pola komunikasi, interaksi dll yang menjadi indicator model kepemimpinan akan mempengaruhi penilaian dari masyarakat maupun staff anggotanya. Maka dari hal tersebut akan menggambarkan model kepemimpinan.